

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur berpedoman kepada 3 (tiga) landasan hukum, yakni :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, kedudukan, tugas dan fungsi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Disnakertransduk dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Disnakertransduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Disnakertransduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan organisasi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. **Kepala Dinas.**
2. **Sekretariat.**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program;
- (3) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas.

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengelolaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas;
- b. pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengukuran produktivitas;
- f. pelaksanaan fasilitasi program peningkatan produktivitas;
- g. pelaksanaan proses perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri;
- i. pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi;
- j. pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- k. pelaksanaan penyusunan pedoman melaksanakan pengawasan sertifikasi kompetensi;
- l. pelaksanaan penyusunan pedoman melaksanakan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

- (1) Seksi Instruktur Pelatihan;
- (2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan;
- (3) Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang ini mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat karya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi;
- i. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan pekerja potensial;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD);
- k. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;
- m. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
- n. pelaksanaan penyampaian materi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
- q. pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya;
- r. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI keluar negeri;

- t. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;
- u. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI;
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja;
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- (3) Seksi Perluasan Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- b. pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- c. pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan,
- d. pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan penerima, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- g. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
- i. pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
- j. pelaksanaan pendaftaran dan menseleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;
- k. pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum;
- l. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh.

- m. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial;
- n. pelaksanaan pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh;
- o. pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- p. pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan.
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
- (2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan;
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan lintas Kab./Kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan audit SMK3;
- g. pelaksanaan pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- h. pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis;
- i. pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;
- j. penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- l. pelaksanaan pengusulan calon peserta diklat pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan pusat untuk penyelenggaraan diklat teknis pengawas ketenagakerjaan;

- n. pelaksanaan pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah;
- o. pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- (1) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- (2) Seksi Keselamatan Kerja;
- (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.

7. Bidang Kependudukan.

Bidang ini melaksanakan tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang, serta melakukan pembinaan bidang administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- f. penyajian dan pengelolaan informasi data kependudukan ;
- g. pelaksanaan pengkajian kependudukan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kependudukan terdiri dari :

- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk;
- (3) Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.

8. Bidang Mobilitas Penduduk.

Bidang ini melaksanakan tugas menyelenggarakan perpindahan dan/atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyiapan, pendaftaran dan seleksi, pelayanan, penataan dan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pendataan animo calon transmigran dan identifikasi pemberdayaan penduduk berpotensi pasar;
- c. pelaksanaan seleksi administrasi fisik dan mental bagi calon transmigran;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan;

- e. pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan;
- f. pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transit;
- g. pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan;
- h. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk berpotensi pasar;
- i. pelaksanaan fasilitasi usaha bagi pengembangan penduduk berpotensi pasar;
- j. pelaksanaan penataan penduduk yang bermukim di kawasan padat disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :

- (1) Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi;
- (2) Seksi Pelayanan Transmigrasi;
- (3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.

9. **20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas**, yang terdiri dari :

- (1) UPT Pelatihan Kerja di Singosari Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);
- (2) UPT Pelatihan Kerja di Jember (wilayah kerja : Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso);
- (3) UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan (wilayah kerja : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan);
- (4) UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto (wilayah kerja : Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto);
- (5) UPT Pelatihan Kerja di Jombang (wilayah kerja : Kab. Jombang);
- (6) UPT Pelatihan Kerja di Tuban (wilayah kerja : Kab. Tuban, Kab. Lamongan);
- (7) UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk (wilayah kerja : Kab. Nganjuk);
- (8) UPT Pelatihan Kerja di Surabaya (wilayah kerja : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik);
- (9) UPT Pelatihan Kerja di Sumenep (wilayah kerja : Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep);
- (10) UPT Pelatihan Kerja di Situbondo (wilayah kerja : Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo);
- (11) UPT Pelatihan Kerja di Kediri (wilayah kerja : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota Blitar, Kab. Blitar);
- (12) UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung (wilayah kerja : Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek);
- (13) UPT Pelatihan Kerja di Madiun (wilayah kerja : Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Madiun);
- (14) UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo (wilayah kerja : Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan);
- (15) UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro (wilayah kerja : Kab. Bojonegoro);

- (16) UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Wonojati di Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);
- (17) UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) di Surabaya;
- (18) UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) di Surabaya;
- (19) UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Surabaya;
- (20) UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo.

(Pembagian wilayah kerja 16 UPT Pelatihan Kerja berdasarkan Keputusan Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim Nomor 563/064/KPTS/106.01/2011).

Adapun tugas dan fungsi UPT-UPT dimaksud adalah sebagai berikut :

A. UPT Pelatihan Kerjadan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN (sebanyak 16 UPT)melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan;
- b. pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan;
- c. penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;
- d. pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa;
- e. pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- f. pendayagunaan fasilitas pelatihan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan kerja, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
- (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran.

B. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) melaksanakan tugas pengembangan produktivitas tenaga kerja di kalangan masyarakat industri, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT PPTK mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja serta pelatihan;

- c. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas tenaga Kerja, baik di sektor pertanian, industri manufaktur dan jasa di kalangan dunia usaha, asosiasi, pemerintah serta masyarakat luas;
- d. pengukuran dan analisis produktivitas tenaga kerja diseluruh strata ekonomi regional/sektoral serta faktor/individu dalam rangka pembentukan standar produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT PPTK dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas UPT. UPT PPTK terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja;
- (3) Seksi Pengukuran dan Analisis Produktivitas Tenaga Kerja.

C. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) melaksanakan tugas seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT P3TKI mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia (TKI);
- c. pemberian perlindungan kepada TKI dan lembaga pelaksana penempatan TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI;
- e. pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri;
- f. penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT P3TKI dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. UPT P3TKI terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Penyiapan dan Bimbingan;
- (3) Seksi Perlindungan dan Evaluasi.

D. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melaksanakan tugas pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan

dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT K3 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan melaksanakan program kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan dan memberikan bantuan teknik higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia berbahaya, higiene perusahaan, pelayanan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT K3 dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. UPT K3 terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelayanan Teknis;
- (3) Seksi Promosi dan Pelatihan.

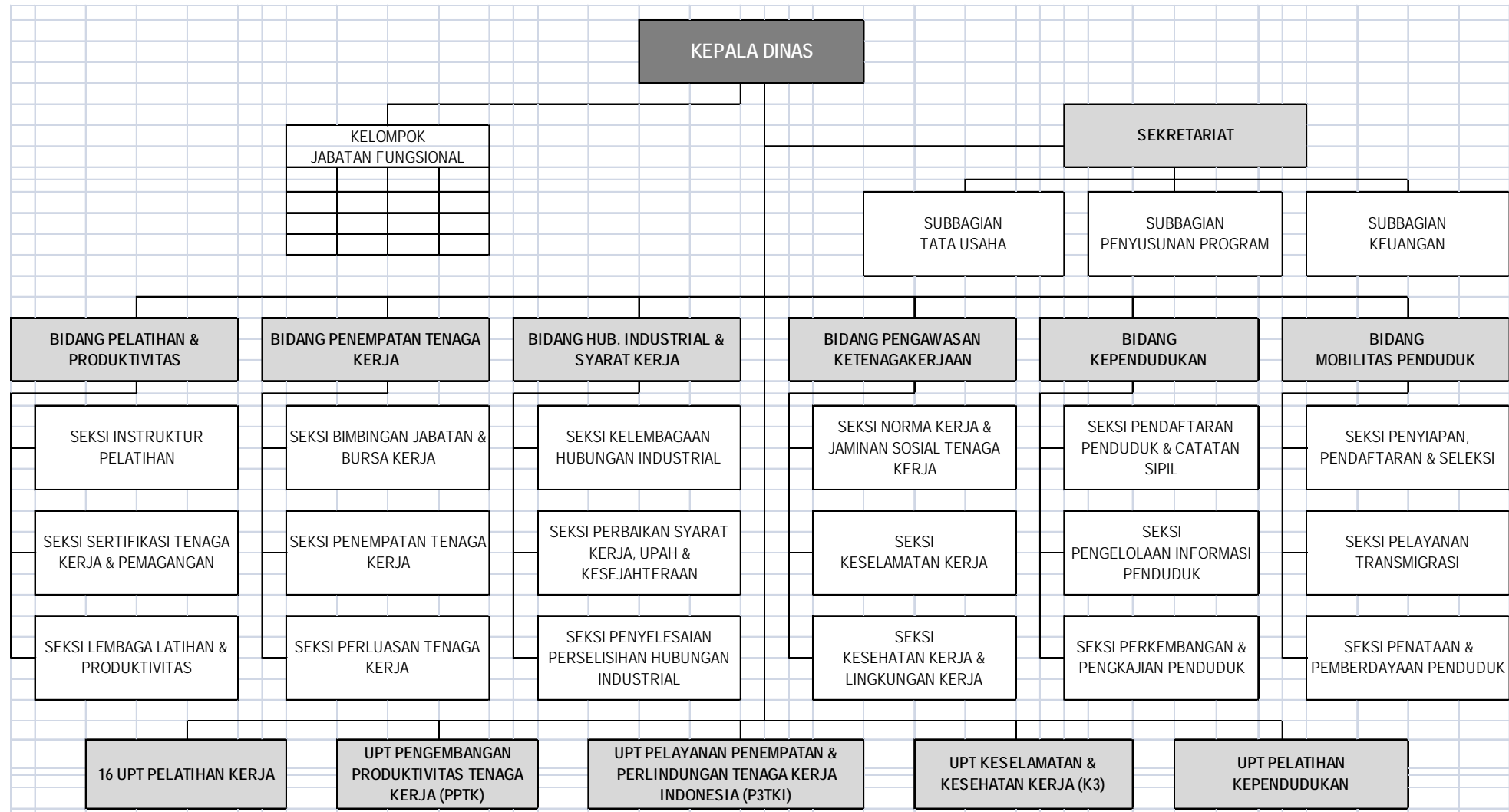
E. UPT Pelatihan Kependudukan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana pelatihan dibidang pengembangan potensi penduduk dan administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan;
- c. pendayagunaan fasilitas dan pemberian layanan informasi pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Pelatihan Kependudukan dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Pelatihan Kependudukan terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelatihan dan Ketrampilan Penduduk Potensial;
- (3) Seksi Pelatihan Administrasi Kependudukan.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Hingga 31 Desember 2013, pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur berjumlah 933 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga Bulan Desember 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-laki	700	75.03
2	Perempuan	233	24.97
JUMLAH		933	100.00

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga Bulan Desember 2013 Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	Struktural Eselon II	1	0.11
2	Struktural Eselon III	24	2.57
3	Struktural Eselon IV	75	8.04
4	Fungsional :	324	34.73
	1) Pengantar Kerja	6	
	2) Pengawas Ketenagakerjaan	13	
	3) Mediator Hub. Industrial	4	
	4) Instruktur	286	
	5) Litkayasa/Perekayasa	15	
5	Staf	509	54.56
JUMLAH		933	100.00

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur yang menduduki jabatan struktural sebesar 10,72%. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada (pejabat struktural bidang ketenagakerjaan sebanyak 87 orang, di bidang ketransmigrasian sebanyak 8 orang, dan di bidang kependudukan sebanyak 4 orang). Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut.

Sedangkan terkait pengisian jabatan struktural, hingga akhir tahun 2013 jabatan struktural yang kosong sebanyak 9 (sembilan) jabatan, meliputi eselon III sebanyak 3 (tiga) jabatan dan eselon IV sebanyak 6 (enam) jabatan. Pengisian jabatan telah diusulkan dengan surat Kepala Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2013 Nomor : x.821.2/18/106.01/2013 perihal Perubahan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, terdapat 15 (lima belas) orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim Tk. IV, dan sudah diusulkan melalui surat Kepala Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 893.3/3381/106.01/2013 perihal Usul Peserta Diklatpim Tk. IV.

Di samping jenis jabatan struktural, terdapat 5 jenis jabatan fungsional di lingkup bidang ketenagakerjaan dengan jumlah total 324 orang atau 34,73% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural. Sebagai gambaran, jumlah Instruktur yang purna tugas tahun 2013 sebanyak 15 (lima belas) orang, sehingga perlu direncanakan penggantian agar kinerja UPT Pelatihan Kerja ke depan tetap berjalan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di Jawa Timur, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengadaan PNS dengan jabatan calon fungsional di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2013 Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur mendapatkan 32 (tiga puluh dua) CPNS dengan formasi 9 (sembilan) calon Pengawas Ketenagakerjaan dan 23 (dua puluh tiga) calon Instruktur. Semua CPNS sudah ditempatkan dan difungsikan sesuai dengan jabatan pada SK. Untuk menduduki jabatan fungsional perlu menempuh diklat dasar fungsional, maka Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur sudah mengusulkan diklat dasar fungsional kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara mandiri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

DiUPT Pelatihan Kependudukan yang memiliki tugas dan fungsi mengadakan pelatihan di bidang kependudukan maupun ketransmigrasian, jabatan fungsional PSM (Penggerak Swadaya masyarakat) hingga tahun 2013 belum mendapat legalitas/pengukuhan sebagai pejabat fungsional, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memberikan pengakuan terhadap jabatan fungsional PSM serta melakukan pembinaan karirnya melalui penetapan angka kredit sebagaimana jabatan fungsional lainnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan pembinaan pada UPT Pelatihan Kependudukan. Direncanakan pada tahun 2014 akan diusulkan pengakuan jabatan

fungsional PSM serta diklat PSM untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional di UPT Pelatihan Kependudukan.

Sedangkan terkait sumpah/janji PNS, dari 509 orang staf Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, sebanyak 12 (dua belas) orang belum diambil sumpah/janji PNS. Direncanakan sumpah akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga Bulan Desember 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S 3	3	0.32
2	S 2	76	8.15
3	S 1	424	45.44
4	Diploma	73	7.82
5	SMA	290	31.08
6	SMP	43	4.61
7	SD	24	2.57
JUMLAH		933	100.00

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu sebesar 45,44% dari seluruh pegawai. Dengan demikian, apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini dianggap telah cukup memadai diperbandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini beberapa pegawai yang berasal dari Diploma maupun SMA tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Demikian juga halnya dengan pegawai berpendidikan S1, beberapa diantaranya tengah melanjutkan pendidikan S2, baik atas biaya sendiri maupun beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga Bulan Desember 2013 Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	IV	173	18.54
2	III	561	60.13
3	II	168	18.01
7	I	31	3.32
JUMLAH		933	100.00

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Disnakertransduk Prov. Jawa Timur terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 60,13% dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 18,54% dari seluruh pegawai Disnakertransduk Prov. Jawa Timur. Dengan demikian, dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang

bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga Bulan Desember 2013 Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	%
1	Kepala Dinas	1	0.11
2	Sekretariat	84	9.00
3	Bidang Pelatihan & Produktivitas	25	2.68
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	35	3.75
5	Bidang Hub. Industrial & Syarat Kerja	30	3.22
6	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	39	4.18
7	Bidang Kependudukan	27	2.89
8	Bidang Mobilitas Penduduk	33	3.54
9	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah :	659	70.63
	1. UPT PK Singosari	57	
	2. UPT PK Jember	31	
	3. UPT PK Pasuruan	32	
	4. UPT PK Mojokerto	39	
	5. UPT PK Jombang	30	
	6. UPT PK Tuban	30	
	7. UPT PK Nganjuk	30	
	8. UPT PK Surabaya	50	
	9. UPT PK Sumenep	23	
	10. UPT PK Situbondo	22	
	11. UPT PK Kediri	36	
	12. UPT PK Tulungagung	37	
	13. UPT PK Madiun	37	
	14. UPT PK Ponorogo	35	
	15. UPT PK Bojonegoro	25	
	16. UPT PK PPTKLN Wonojati	42	
	17. UPT PPTK Surabaya	19	
	18. UPT P3TKI Surabaya	32	
	19. UPT K3 Surabaya	32	
	20. UPT Pelatihan Kependudukan	20	
JUMLAH		933	100.00

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 933 pegawai di lingkup Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, sebanyak 659 orang atau 70,63% diantaranya berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini dikarenakan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur memiliki 20 (dua puluh) UPT yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2.2.2 Aset

Hinggatahun 2013, jumlah aset tetap Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Kondisi Hingga 31 Desember 2013

NO	BIDANG BARANG	JML	SATUAN	NILAI (Rp)	RUSAK BERAT
I. AKTIVA TETAP					
A	GOLONGAN TANAH	37	Bidang	379,481,177,250	
1	TANAH	37	Bidang	379,481,177,250	
B	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	58,445		128,006,595,779	3,206
2	ALAT-ALAT BESAR	1,474	Buah/set	3,607,880,683	15
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	439	Buah	14,694,745,276	160
4	ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	12,345	Buah	38,590,792,756	
5	ALAT-ALAT PERTANIAN	2,014	Buah/set	1,723,774,680	
6	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	34,584	Buah	50,316,798,868	3,031
7	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	1,472	Buah	7,353,066,676	
8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	398	Buah	1,221,336,118	
9	ALAT-ALAT LABORATORIUM	5,669	Buah	10,480,391,722	
10	ALAT-ALAT KEAMANAN	50	Buah	17,809,000	
C	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	905		119,229,266,102	
11	BANGUNAN GEDUNG	903	Buah	119,207,946,102	
12	MONUMEN	2	Buah	21,320,000	
D	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	65		4,544,703,560	
13	JALAN DAN JEMBATAN	16	Buah	2,060,583,200	
14	BANGUNAN AIR	17	Buah	348,120,639	
15	INSTALASI	18	Buah	962,331,049	
16	JARINGAN	14	Buah	1,173,668,672	
E	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	746		275,309,700	
17	BUKU/PERPUSTAKAAN	536	Buah/set	39,047,800	
18	BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	196	Buah/set	79,815,000	
24	HEWAN/TERNAK DAN TUMBUH-TUMBUHAN	14	Ekor/buah	156,446,900	
F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0			
JUMLAH I		60,198		631,537,052,391	3,206
II. AKTIVA TAK BERWUJUD					
1	SOFTWARE KOMPUTER	3	Buah	1,411,137,970	
2	LISENSI DAN FRANCHISE	0			
3	HAK CIPTA (COPY RIGHT), PATEN	0			
4	HASIL KAJIAN/PENELITIAN	13	Buah	1,401,915,000	
JUMLAH II		16		2,813,052,970	
TOTAL NILAI				634,350,105,361	3,206

Jumlah aset Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 60.214 buah/set, terdiri dari 60.198 buah/set merupakan Aktiva Tetap, dan 16 buah merupakan Aktiva Tak Berwujud. Pada tahun 2014 Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur merencanakan untuk melakukan validasi barang yang tergolong sudah tidak layak guna/pakai terhadap barang yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis meskipun diperbaiki. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat kondisi-kondisi seperti modernisasi, barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan sebagainya, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan.

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Tabel 2.7
Daftar Unit Usaha Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
Yang Masih Operasional Tahun 2013

NO	UNIT USAHA	JML	SATUAN
1	KANTIN	2	UNIT
2	LAPANGAN OLAH RAGA (TENIS LAPANGAN, BULU TANGKIS, VOLLEY BALL)	4	UNIT
3	KOPERASI KARYAWAN	2	UNIT
4	MINI MARKET	1	UNIT

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-					REALISASI CAPAIAN THN KE-					RASIO CAPAIAN PADA THN KE-				
					1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi			V	3,00	5,00	10,00	20,00	30,00	-18,33 (turun)	-28,82 (turun)	109,53	66,96	39,81	-61,10	-576,40	1.095,30	334,80	132,70
2	% peningkatan calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di : - Dalam negeri - Luar negeri			V	3,00 5,00	5,00 7,00	7,00 10,00	9,00 20,00	11,00 30,00	3,00 -73,33 (turun)	60,00 229,17	-27,50 26,58	20,69 50,00	8,57 60,67	100,00 -1.466,6	1.200,00 3.273,86	-392,86 265,80	229,89 250,00	77,91 202,23
3	% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja			V	n.a	n.a	20,00	23,00	26,00	n.a	n.a	23,89	24,34	26,83	-	-	119,45	105,83	103,19
4	Hasil survey IKM pelayanan pelatihan				76,70	77,00	78,00	79,00	80,00	76,70	76,17	78,10	79,39	79,98	100,00	98,92	100,13	100,49	99,98
5	% penempatan pencari kerja			V	n.a	n.a	42,08	48,00	55,00	n.a	n.a	42,08	54,33	58,41	-	-	100,00	113,19	106,20
6	Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : - % perusahaan anggota aktif PLKT - % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja			V	40,00 n.a	50,00 5,00	60,00 10,00	70,00 20,00	75,00 20,00	72,88 n.a	60,78 18,18	64,19 15,38	75,00 96,67	75,07 20,34	182,20 -	121,56 363,60	106,98 153,80	107,14 483,35	100,09 101,70
7	Hasil survey IKM : - Pelayanan penempatan tenaga kerja - Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)			V	79,07 75,77	79,20 75,90	79,40 76,00	79,60 76,20	79,80 76,35	79,07 75,77	78,56 76,43	76,25 67,17	74,66 72,35	74,81 71,27	100,00 100,00	99,19 100,70	96,03 88,38	93,79 94,95	93,75 93,35
8	% tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis)			V	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,86	95,51	109,20	106,74	104,40	103,08	100,54
9	% penurunan kasus perselisihan hub. Industrial			V	3,00	5,00	10,00	15,00	15,00	3,11	-171,56 (naik)	35,47	63,35	-5,71	103,67	-343,12	354,70	422,33	-26,27
10	% peningkatan upah pekerja			V	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	17,07	7,54	8,34	8,08	22,14	243,86	107,71	104,25	101,00	246,00
11	% peningkatan Peraturan Perusahaan (PP)			V	n.a	n.a	25,00	30,00	33,00	n.a	n.a	26,37	36,35	35,95	-	-	105,48	121,17	121,07
12	% peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			V	n.a	n.a	20,00	22,00	25,00	n.a	n.a	33,97	42,42	24,96	-	-	169,85	192,82	99,84
13	Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hub. Industrial			V	80,67	80,75	80,85	81,00	81,15	80,67	72,74	72,61	75,23	77,09	100,00	90,08	89,81	92,88	95,00
14	% penurunan kasus kecelakaan kerja			V	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	-42,36 (naik)	-12,91 (naik)	-35,67 (naik)	10,39	9,75	-84,72	-18,44	-35,67	86,58	65,00

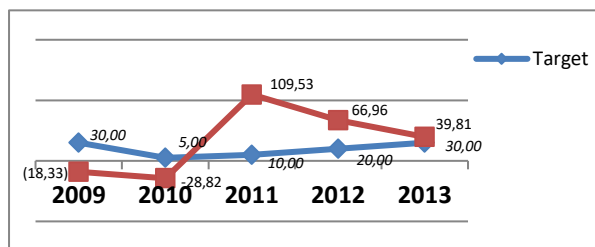
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-					REALISASI CAPAIAN THN KE-					RASIO CAPAIAN PADA THN KE-				
					1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	% peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) : - Kecelakaan nihil (zero accident) - SMK3 (Sistem Manajemen K3)			V	0,60 20,00	5,00 22,00	10,00 24,00	20,00 25,00	25,00 25,00	0,60 20,00	-15,79 (turun) 266,67	47,92 0,00	29,11 45,45	25,82 18,75	100,00 100,00	-31,58 1.212,14	479,20 -100,00	145,55 181,80	103,28 75,00
16	% kepesertaan jamsostek aktif : - Orang (tenaga kerja) - Perusahaan	50% (Th 2016)	50% (Th 2016)	V	35,00 62,00	36,00 63,00	37,00 64,00	38,00 65,00	39,00 66,00	39,40 62,66	37,93 64,46	37,78 65,66	37,18 66,72	36,27 66,34	112,57 101,06	105,36 102,32	102,11 102,59	97,84 102,65	93,00 100,52
17	% pengujian kualitas udara emisi & ambien			V	93,68	94,00	94,50	95,00	95,50	93,68	87,55	94,47	96,53	100,00	100,00	93,14	99,97	101,61	104,71
18	% pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja			V	83,33	85,00	87,00	90,00	93,00	83,33	15,15	93,48	96,67	84,62	100,00	17,82	107,45	107,41	90,99
19	Hasil survey IKM pelayanan K3			V	76,10	76,50	77,00	77,50	78,00	76,10	77,14	74,87	77,85	79,55	100,00	100,84	97,23	100,45	101,99
20	% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP			V	n.a	n.a	89,50	90,00	96,00	n.a	n.a	89,50	85,65	88,05	-	-	100,00	95,17	91,72
21	% penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga)			V	45,12	50,00	55,00	60,00	65,00	45,12	98,53	63,08	55,56	84,79	100,00	197,06	114,69	92,60	130,45
22	% transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi & sosialnya			V	n.a	n.a	n.a	22,56	28,00	n.a	n.a	n.a	22,56	58,82	-	-	-	100,00	210,07

Analisis capaian kinerja pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. **% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi :**

Pada periode tahun 2009 - 2013, secara umum jumlah siswa yang mengikuti uji keterampilan dan/atau uji kompetensi sehingga lulus pelatihan, dan berhak mendapat sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi menunjukkan *trend* meningkat. Rata-rata capaian kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir mencapai di atas 100% (159,29%).

Diagram 2.1
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi tahun 2009 - 2013



Besarnya angka kelulusan pelatihan kerja mengindikasikan semakin banyaknya tenaga kerja/calon tenaga kerja yang memiliki bekal keterampilan (*skill*) maupun kompetensi yang didukung oleh sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi sebelum mereka memasuki dunia kerja. Dengan bekal *skill*/kompetensi dan sertifikat tersebut, tenaga kerja yang telah dilatih lebih memiliki daya saing dan kekuatan tawar (*bargaining position*) untuk mengisi peluang di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mereposisi 16 (enam belas) **UPT Pelatihan Kerja menjadi bertaraf internasional** (dimulai tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2014). Dengan adanya pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan, maka kapasitas dan kualitas pelatihan makin meningkat. Kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti kebutuhan pasar kerja di dalam negeri maupun luar negeri, serta mengikuti perkembangan IPTEK.

Upaya pengembangan dan penguatan kompetensi dilakukan dengan mewujudkan UPT Pelatihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Salah satu arah pengembangan/penguatannya adalah dengan membangun **TUK (Tempat Uji Kompetensi)** di UPT-UPT Pelatihan Kerja. Kini terdapat 28 TUK di 11 (sebelas) UPT Pelatihan Kerja, yaitu untuk subkejuruan las, mesin logam, listrik, otomotif (roda 2 dan roda 4), multi media, aneka kejuruan, teknologi mekanik, pertanian, teknologi informatika, garmen, komputer, dan LMI (Logam Mesin Indonesia). Sedangkan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, pada tahun 2012 telah terbentuk **16 Production Training Center (PTC)** dari semula hanya ada 1 PTC di tahun 2011. PTC didirikan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pelatihan sekaligus memproduksi. Di samping itu, UPT-UPT Pelatihan Kerja menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya melalui MoU atau menjangkau program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan di bidang pelatihan, pemagangan

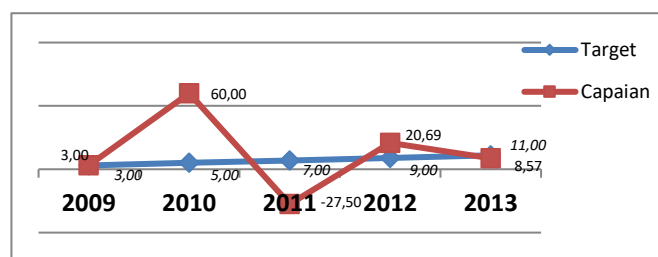
atau penempatan kerja. Dengan demikian, alumni siswa pelatihan UPT PK memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan/kompetensinya, ditunjang sertifikat keterampilan/sertifikat kompetensi yang diakui secara lokal maupun internasional, sehingga alumni siswa pelatihan berpeluang lebih besar untuk mengisi kesempatan kerja di sektor formal.

2. % peningkatan calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan :

- Magang dalam negeri :

Magang dalam negeri pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan sebagaimana nampak dari diagram berikut :

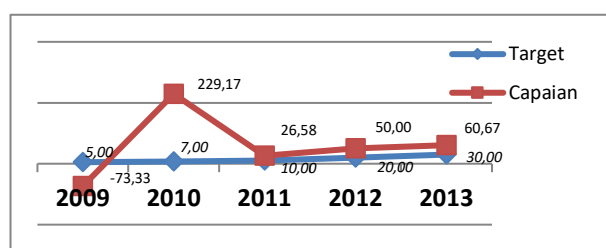
Diagram 2.2
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri tahun 2009 - 2013



- Magang luar negeri (magang ke Jepang) :

Dari segi jumlah, angka magang ke Jepang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah peserta magang Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan semakin banyaknya calon siswa magang yang memenuhi syarat untuk belajar kerja di Jepang dan telah mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Jepang. Namun, penambahan jumlah peserta magang yang tidak terlalu signifikan dikarenakan ketatnya seleksi yang dilakukan langsung oleh Kemnakertrans RI serta IMM Jepang (*Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises*), meski dari segi kuantitas terdapat peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun.

Diagram 2.3
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di luar negeri tahun 2009 - 2013

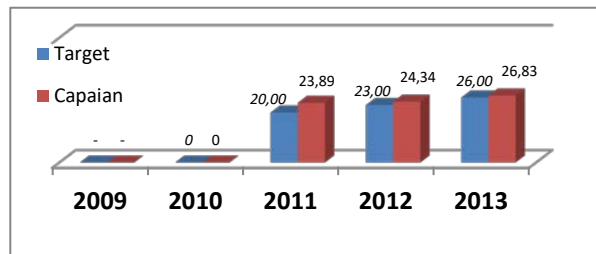


3. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja :

Dari target pertumbuhan produktivitas tenaga kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, *trend*-nya cenderung positif dengan capaian kinerja rata-rata di atas 100%. Namun di tahun 2009 dan 2010 belum dilakukan pengukuran secara spesifik atas pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada UKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi

produktivitas, sehingga tidak dapat diperoleh data terkait pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya.

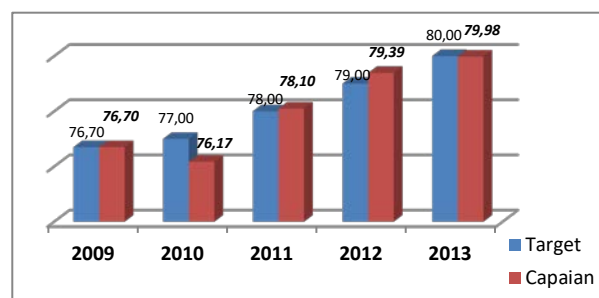
Diagram 2.4
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tahun 2009 - 2013



4. Hasil Survey IKM pelayanan pelatihan:

Dilakukan terhadap siswa yang telah mengikuti pelatihan di 16 UPT Pelatihan Kerja maupun UPT Pelatihan Kependudukan, baik pelatihan Instiusional, pelatihan Non Instiusional atau MTU (*Mobile Training Unit*), maupun pelatihan Swadana/Pihak-III, dengan kriteria pelatihan PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) maupun PBM (Pelatihan Berbasis Masyarakat). Secara umum, capaian nilai IKM pelayanan pelatihan tahun 2009 - 2013 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan 'baik'). Secara keseluruhan, hasil survey IKM pelayanan pelatihan menunjukkan *trend* positif, terutama pada 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini antara lain disumbang oleh faktor keberadaan SPP (Standar Pelayanan Publik) sehingga UPT-UPT terkait dalam melaksanakan pelayanan pelatihan berpedoman kepada SPP secara penuh. Disamping itu, faktor reposisi UPT Pelatihan Kerja menjadi berstandar internasional yang didukung oleh keberadaan Kios *3in1 Plus Plus*, *Production Training Center* (PTC), TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan sarana-prasarana pendukung lainnya turut berkontribusi terhadap naiknya tingkat kepuasan masyarakat (siswa) yang memanfaatkan jasa pelatihan kerja.

Diagram 2.5
Perkembangan target dan capaian kinerja
hasil survei IKM pelayanan pelatihan tahun 2009 - 2013

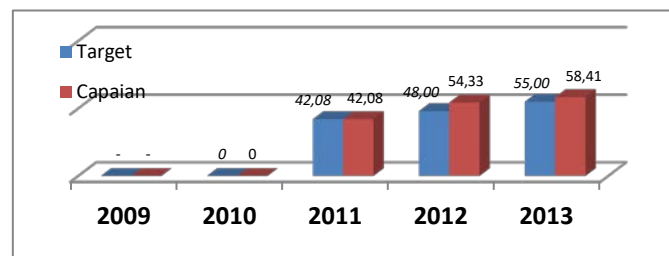


5. % penempatan pencari kerja :

% penempatan pencari kerja di sektor formal menunjukkan *trend* positif. Dari tahun ke tahun semakin banyak tenaga kerja terserap di sektor formal. Rata-rata capaian kinerjanya menunjukkan angka di atas 100% (106,46%). Namun kinerja penempatan pencari kerja baru dilaksanakan selama 3 tahun, mengingat indikator ini sama dengan

indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) pelayanan penempatan, yang baru efektif berjalan mulai tahun 2011.

Diagram 2.6
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase penempatan pencari kerja tahun 2009 - 2013



Kondisi positif kinerja penempatan antara lain dikarenakan :

- Naiknya angka penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kab./Kota;
- Pendataan terhadap angka penyerapan tenaga kerja kontrak di perusahaan melalui PPJP (mulai tahun 2010);
- Pendataan terhadap angka penempatan tenaga kerja yang semakin akurat;
- Sebagai terobosan dalam mensosialisasikan, mengakomodasi peningkatan lowongan kerja, mengoptimalkan penempatan tenaga kerja, dan mengefektifkan fungsi layanan penempatan tenaga kerja, Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur menggagas Bursa Kerja Bulanan (bursa kerja mini/berskala kecil). Hal ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja, partisipasi perusahaan yang melaporkan lowongan yang tersedia, serta peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja dari rata-rata jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui Bursa Kerja Bulanan.
- Adanya MoU jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.
- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja secara *online* melalui [website www.infokerja-jatim.com](http://www.infokerja-jatim.com) untuk mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja. *Website* dapat diakses oleh pencari kerja, perusahaan/dunia usaha maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Penggunaan sarana teknologi informasi ini sangat besar manfaatnya dalam menyediakan informasi pasar kerja yang cepat, akurat dan murah, serta membantu mempercepat layanan penempatan tenaga kerja.

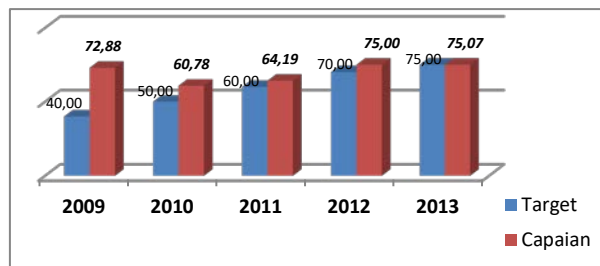
6. Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja :

- Persentase perusahaan anggota aktif PLKT :

Keanggotaan aktif perusahaan pada Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) dari tahun ke tahun menunjukkan *trend* yang sangat positif. Pada tahun 2013, jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai anggota PLKT sebanyak 694 perusahaan, yang aktif menginformasikan lowongan sebanyak 521 perusahaan. Diamati dari capaian 4 (empat) tahun terakhir, nampak angka keikutsertaan perusahaan sebagai anggota PLKT meningkat signifikan, dimana pada tahun 2009 ke 2010 di masa-masa awal

terbentuknya PLKT, keanggotaan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meski dari tahun ke tahun secara persentase mulai tampak perlambatan kenaikan perusahaan yang menjadi anggota PLKT, namun secara kuantitas semakin banyak perusahaan yang menjadi anggota PLKT dan aktif menginformasikan lowongan pekerjaan secara *online* (melalui *website* PLKT) maupun *offline* melalui layanan PLKT. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran pengusaha untuk melaporkan informasi lowongan di perusahaan yang bersangkutan (kepatuhan terhadap Keppres No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporkan Lowongan), sehingga pencari kerja semakin banyak mendapatkan informasi peluang kerja.

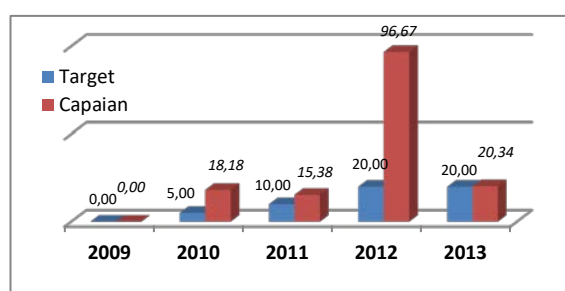
Diagram 2.7
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase perusahaan anggota aktif PLKT tahun 2009 - 2013



- Persentase peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja :

Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja yang bergabung menjadi anggota BKK (Bursa Kerja Khusus) di *website* PLKT meningkat sangat tajam, dimana tahun 2009 ke 2010 di masa awal terbentuknya PLKT, mitra kerja baru berjumlah 22 lembaga. Kemudian di tahun 2011 jumlahnya bertambah 4 lembaga menjadi 26 BKK. Selanjutnya, tahun 2011 ke 2012 mulai mengalami pertumbuhan sangat signifikan, yaitu bertambah 29 lembaga hingga jumlahnya menjadi 59 BKK. Terakhir, pada tahun 2013 kembali bertambah 12 lembaga sehingga jumlahnya menjadi 71 BKK. Pesatnya pertumbuhan jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja yang bergabung menjadi anggota BKK antara lain merupakan dampak dari dilakukannya pembinaan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi secara intens kepada BKK-BKK di lingkup UPT Pelatihan Kerja maupun lingkup pendidikan (perguruan tinggi, SMA/SMK) terkait pentingnya pengembangan jejaring bursa kerja dan sistem Antar Kerja untuk membantu mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja di pasar kerja.

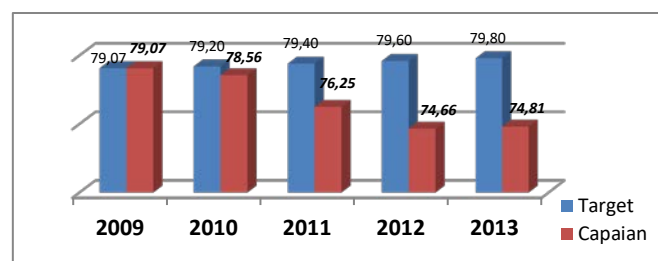
Diagram 2.8
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja tahun 2009 - 2013



7. Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja :

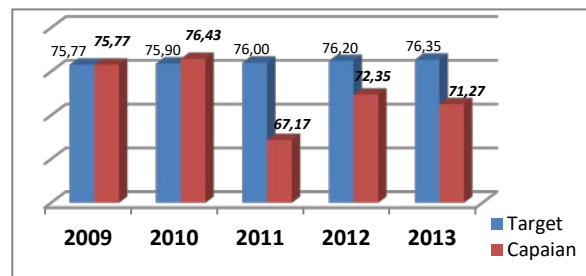
- Pelayanan penempatan tenaga kerja, meliputi pelayanan antar kerja, yakni (a) informasi pasar kerja/bursa kerja/penempatan kerja *offline* dan *online*, (b) pencabutan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing atau IMTA, (c) rekomendasi penempatan tenaga kerja antar daerah, (d) ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta atau LPTKS untuk antar kerja lokal, dan (e) ijin operasional kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau PPTKIS. Jika diamati, selama periode 2009 – 2013, capaian nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja menunjukkan *trend* menurun. Penyebabnya antara lain adalah adanya perubahan pada beberapa jenis pelayanan yang di-survey. Pada tahun 2009 (awal dilakukannya survey IKM), jenis pelayanan yang di-survey termasuk pelayanan-pelayanan terkait Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Namun mengingat pelayanan IMTA kemudian dialihkan menjadi pelayanan di UPT P2T Provinsi Jawa Timur (pelayanan perijinan satu atap), ditambah baru terbentuknya Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, maka sejak 2 (dua) tahun terakhir terjadi perubahan beberapa jenis pelayanan yang di-survey dengan responden yang berbeda pula, sehingga capaian nilai IKM belum stabil. Meski demikian, secara umum capaian nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja tahun 2009 - 2013 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan 'baik').

Diagram 2.9
Perkembangan target dan capaian kinerja
hasil survei IKM pelayanan penempatan tenaga kerja tahun 2009 - 2013



- Pelayanan khusus TKI (Tenaga Kerja Indonesia), meliputi (a) rekomendasi Rencana Kebutuhan Calon TKI (RKCTKI) atau Surat Pengantar Rekrut TKI (SPR TKI), (b) surat pengantar rekomendasi *endors* visa ke Teto, (c) penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN, (d) Pembekalan Akhir Pemberangkatan atau PAP, dan (e) *counter* TKI. Jika diamati, capaian nilai IKM pelayanan TKI menunjukkan adanya fluktuasi, terutama di tahun 2011 yang sempat menunjukkan penurunan. Salah satu yang menjadi penyebab adalah adanya perubahan pada beberapa jenis pelayanan, menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan di UPT P3TKI, sehingga capaian nilai IKM belum stabil. Meski demikian, sebagaimana halnya dengan pelayanan penempatan tenaga kerja, capaian nilai IKM pelayanan TKI tahun 2009 - 2013 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan 'baik').

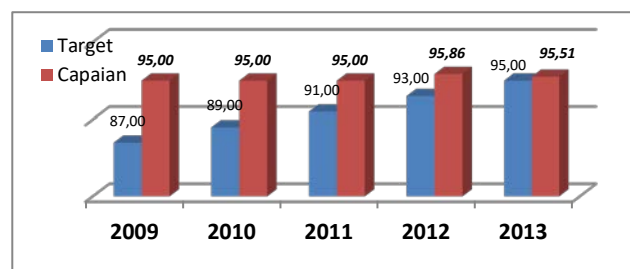
Diagram 2.10
Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan TKI tahun 2009 - 2013



8. **% tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis) :**

Salah satu indikator yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal melalui sektor ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang dibina di sektor informal secara minimal usaha mandiri yang dirintisnya tetap eksis. Artinya, tenaga kerja yang dibina telah memiliki pendapatan tetap dari usahanya tersebut, usahanya tidak berhenti beroperasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang cukup tinggi dan merekrut banyak tenaga kerja baru di daerah sekitarnya. Secara keseluruhan, persentase tenaga kerja di sektor informal yang usahanya tetap eksis cenderung stabil, yaitu berkisar 95% dari jumlah binaan per tahun. Meski demikian, untuk mendukung program Nasional perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, capaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkat sesuai target yang ditetapkan, sehingga makin banyak penganggur/pencari kerja yang tertampung di sektor informal dan formal.

Diagram 2.11
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis) tahun 2009 - 2013

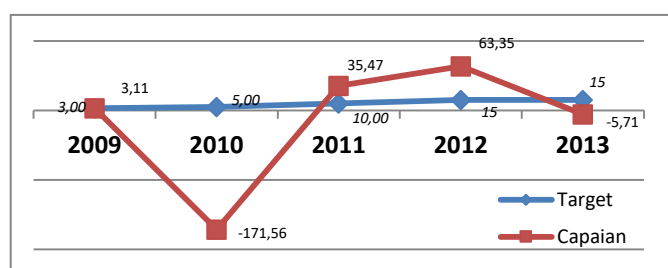


9. **% penurunan kasus perselisihan hub. Industrial :**

Kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi. Idealnya, persentase kasus perselisihan hubungan industrial menurun secara bertahap yang mencerminkan semakin kondusifnya iklim hubungan industrial. Namun kondisi yang tidak terduga seperti krisis moneter global berimbas pada sulitnya dunia usaha di sektor formal untuk bertahan, antara lain menyebabkan naiknya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial (dari 4 jenis kasus perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan PHK selalu mendominasi kasus hingga mencapai rata-rata di atas 70% dari keempat jenis perselisihan yang ada). Salah satu upaya yang dapat mendorong iklim hubungan

industrial yang kondusif di Jawa Timur adalah dibentuknya **Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Masalah Hubungan Industrial** pada tahun 2010. Pembentukan unit ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan menjadi fasilitator untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial yang berpotensi mengakibatkan timbulnya gejolak berupa unjuk rasa/pemogokan sebagai akibat dari keluh kesah yang tidak terselesaikan, dengan cara menginventarisir dan menganalisa faktor-faktor terjadinya keresahan untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Tujuannya adalah untuk penanganan dan pencegahan permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. Dalam penanganannya, URC tetap berkoordinasi dengan pegawai teknis dan Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan prosedur dan kewenangan masing-masing.

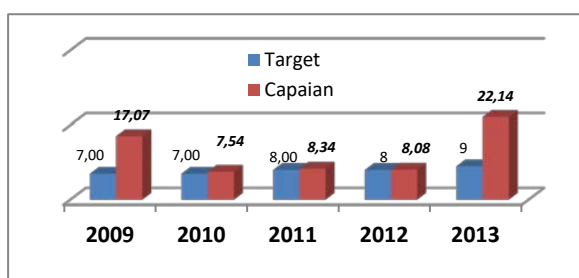
Diagram 2.12
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2009 - 2013



10. % peningkatan upah pekerja :

Selama beberapa tahun terakhir, persentase rata-rata Upah Minimum Kab./Kota (UMK) se-Jawa Timur selalu mengalami kenaikan, seperti nampak pada diagram berikut ini :

Diagram 2.13
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase peningkatan upah pekerja tahun 2009 - 2013

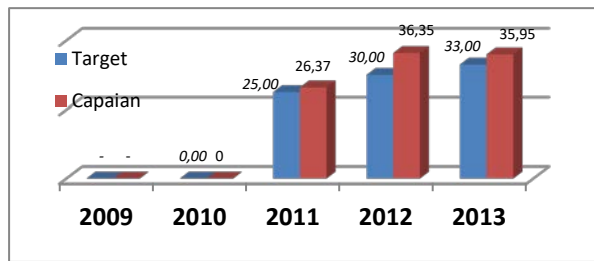


Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara bertahap dunia usaha di Jawa Timur semakin memberikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk kenaikan nilai upah minimum. Disamping itu, mulai tahun 2013 nilai UMK dari 38 Kab./Kota se-Jawa Timur seluruhnya sudah mencapai, dan bahkan banyak yang melampaui 100% dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

11. % peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) :

Perkembangan jumlah kenaikan Peraturan Perusahaan di Jawa Timur selama periode 2009 – 2013 ditunjukkan sebagai berikut :

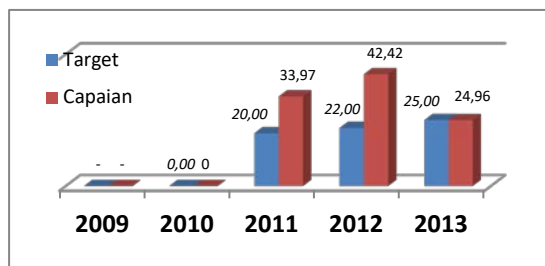
Diagram 2.14
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2009 - 2013



12. % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) :

Perkembangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Jawa Timur selama periode 2009 – 2013 ditunjukkan sebagai berikut :

Diagram 2.15
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2009 - 2013

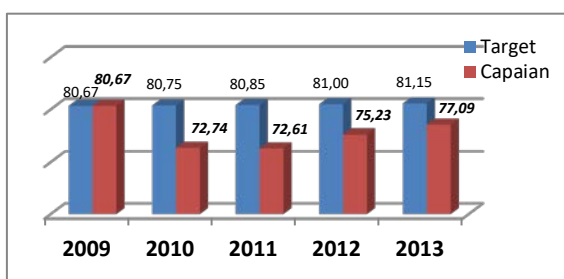


Kenaikan jumlah PP maupun PKB di tahun 2009 dan 2010 tidak bisa ditentukan targetnya (*not available*). Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut pendataan jumlah PP dan PKB di Jawa Timur masih sangat lemah/minim, terutama berkenaan dengan data-data yang bersumber dari 38 Kab./Kota. Baru mulai tahun 2010 dilakukan pembenahan dalam pendataan PP maupun PKB baik dari Provinsi maupun Kab./Kota, sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

13. Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hub. Industrial:

Survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial dilakukan terhadap responden yaitu pihak-pihak yang mendapat layanan (a) penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas Kab./Kota, (b) penanguhan pelaksanaan ketentuan upah minimum Kab./Kota, (c) pengesahan peraturan perusahaan (PP) lintas Kab./Kota, dan (d) pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) lintas Kab./Kota. Capaian nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial pada kurun waktu 2010 – 2011 sempat menunjukkan penurunan, dan mulai naik kembali di tahun 2012. Namun realisasi di tahun 2012 pun belum mencapai target yang ditetapkan. Meski secara umum capaian nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial selama tahun 2009 - 2012 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan 'baik'). Dengan demikian, meskipun kondisi hubungan industrial di Jawa Timur relatif kondusif yang ditunjukkan melalui semakin berkurangnya kasus perselisihan hubungan industrial, namun dari segi pelayanan masih perlu mendapat evaluasi dan perbaikan.

Diagram 2.16
Perkembangan target dan capaian kinerja
hasil survei IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial tahun 2009 - 2013



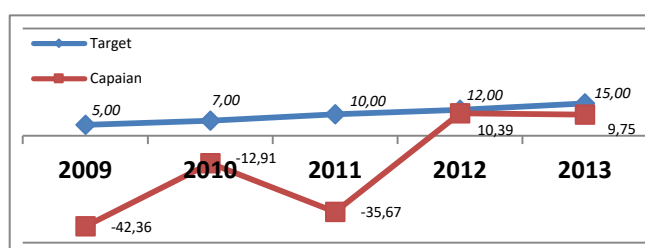
14. % penurunan kasus kecelakaan kerja :

Idealnya, salah satu indikator dari penciptaan kondisi tempat kerja yang kondusif ditunjukkan melalui turunnya angka kecelakaan di tempat kerja, yang dilaporkan melalui Dinas Kab./Kota se-Jawa Timur. Namun mulai tahun 2009 hingga 2013, angka kecelakaan kerja di Jawa Timur bersifat fluktuatif. Kondisi ini terjadi antara lain dikarenakan (1) Kurangnya pembinaan di Kab./Kota terutama untuk tempat-tempat usaha yang mempunyai potensi berbahaya ataupun di industri padat tenaga kerja, (2) Perusahaan kurang sadar akan pentingnya budaya keselamatan di tempat kerja yang mengancam tiap saat, sedangkan perusahaan baru memperhatikan faktor keselamatan kerja apabila ada pembinaan dan pengawasan dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota maupun Provinsi, dan (3) P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja belum terbentuk 100%, hingga saat ini baru 10% P2K3 yang terbentuk.

Berdasarkan kondisi eksisting, perlu dilakukan langkah-langkah mengurangi jumlah kecelakaan kerja di kemudian hari, antara lain melalui :

- Peningkatan jumlah P2K3 dan mendorong lahirnya tokoh P2K3 di perusahaan yang dapat memberikan motivasi tentang pentingnya keselamatan kerja di tempat kerja sehingga semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di tempat kerja;
- Dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap seluruh perusahaan di Jawa Timur;
- Memberdayakan serikat pekerja dalam kegiatan sosialisasi dengan harapan agar serikat pekerja setempat dapat ikut mengawasi keselamatan di tempat kerja sehingga meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan kerja;
- Mendorong pembudayaan K3 di Jawa Timur melalui pemberian penghargaan di bidang K3.

Diagram 2.17
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase penurunan kasus kecelakaan kerja tahun 2009 - 2013

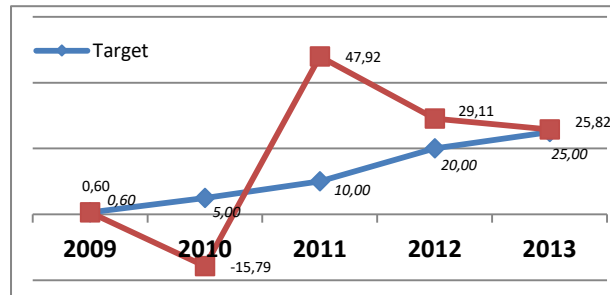


15. % peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) :

Pada tahun 2009 - 2013, perkembangan perusahaan yang mendapat penghargaan Kecelakaan Nihil masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, sebagaimana nampak melalui diagram berikut :

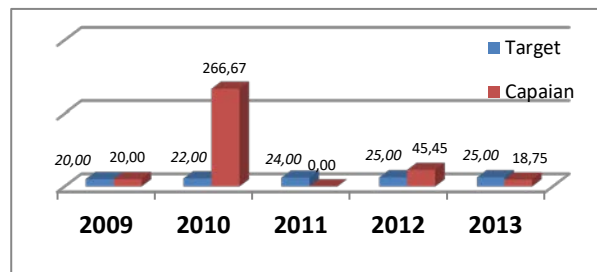
Diagram 2.18
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil (*zero accident*) tahun 2009 - 2013



- SMK3 (Sistem Manajemen K3) :

Pada tahun 2009 - 2013, perkembangan perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, yang nampak seperti berikut ini :

Diagram 2.19
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 tahun 2009 - 2013

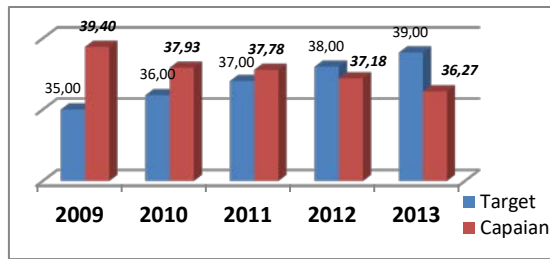


16. % kepesertaan jamsostek aktif :

- Kepesertaan Jamsostek aktif (tenaga kerja) :

Jika diamati, pada periode 2009 – 2013 secara persentase terjadi penurunan kepesertaan aktif tenaga kerja dalam Program Jamsostek dibandingkan jumlah tenaga kerja di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Jawa Timur dari tahun ke tahun lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah anggota aktif Jamsostek. Namun dari segi kuantitas, peningkatan jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta aktif menunjukkan *trend* positif. Artinya, semakin banyak tenaga kerja yang didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk diikuti dalam Program Jamsostek, menunjukkan semakin tingginya kesadaran perusahaan di Jawa Timur untuk melindungi pekerjaannya dari resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja.

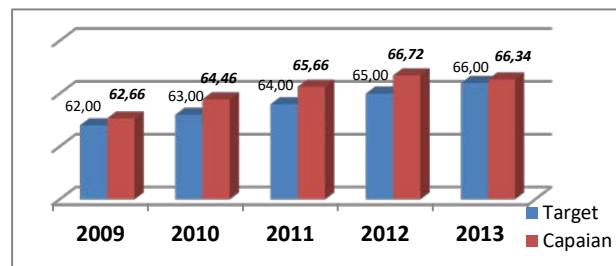
Diagram 2.20
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase kepesertaan jamsostek aktif (tenaga kerja) tahun 2009 - 2013



- **Kepesertaan Jamsostek aktif (perusahaan) :**

Kepesertaan aktif perusahaan pada program Jamsostek selalu menunjukkan perkembangan positif, dimana setiap tahunnya angka perusahaan yang menjadi peserta aktif selalu meningkat. Hal itu berarti semakin banyak perusahaan yang memiliki kesadaran dan memahami arti pentingnya ikut serta dalam program Jamsostek untuk melindungi pekerjaannya dari resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja. Namun perlu tetap dilakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap perusahaan (terutama perusahaan skala menengah dan kecil) untuk mengikuti Program Jamsostek guna melindungi perusahaan dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja.

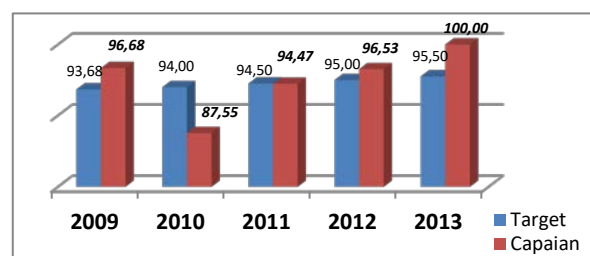
Diagram 2.21
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase kepesertaan jamsostek aktif (perusahaan) tahun 2009 - 2013



17. % pengujian kualitas udara emisi dan ambien :

Pada tahun 2013, dari 325 perusahaan yang meminta pengujian kualitas udara emisi dan ambien, seluruhnya dapat dipenuhi. Tahun 2012 dari 779 perusahaan yang meminta pengujian kualitas udara emisi dan ambien). Tahun 2011, dari 723 perusahaan yang meminta pengujian, telah diuji 683 perusahaan. Pada tahun 2010 dari 683 perusahaan yang meminta pengujian, dilakukan pengujian terhadap 598 perusahaan. Sedangkan di tahun 2009, pengujian terhadap perusahaan sebanyak 430 perusahaan dari 459 perusahaan yang meminta dilakukan pengujian.

Diagram 2.22
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase pengujian kualitas udara emisi dan ambien tahun 2009 - 2013

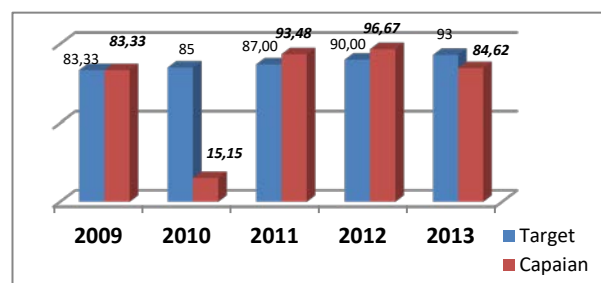


18. % pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja :

Pada tahun 2013, dari 13 perusahaan yang meminta pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja, dipenuhi sebanyak 11 perusahaan. Pada tahun 2012, dilakukan pemeriksaan sebanyak 64 perusahaan dari 66 perusahaan yang meminta pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja. Tahun 2011, dari 46 perusahaan yang meminta pemeriksaan, telah diperiksa sebanyak 43 perusahaan. Sementara itu di tahun 2010 dari 33 perusahaan yang meminta pemeriksaan, hanya bisa dilakukan pemeriksaan terhadap 5 perusahaan. Sedangkan di tahun 2009, pengujian terhadap perusahaan sebanyak 10 perusahaan dari 12 perusahaan yang meminta dilakukan pengujian lingkungan kerja dan tenaga kerja.

Dari capaian kinerja yang ada, pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh UPT K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) belum mampu memenuhi permintaan kalangan industri secara optimal, terbukti sempat terjadi penurunan angka pengujian maupun pemeriksaan. Sementara di sisi lain, permintaan kalangan industri semakin tinggi, yang menunjukkan membaiknya kesadaran sebagian kalangan pengusaha industri untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan di bidang hiperkes. Kondisi ini disebabkan keberadaan alat-alat laboratorium sebagai pendukung pengujian kualitas udara dan lingkungan industri (GC/MS atau *Gas Chromatography Mass Spectrometer*, AAS atau *Atomic Absorption Spectrophotometer*, *Stargas Analyzer*) yang sudah tidak optimal berfungsi dan belum ada peremajaan. Padahal keberadaan instrumen ini sangat vital, dimana semua parameter pengujian harus diolah melalui instrumen ini sehingga dukungan dari alat-alat tersebut mutlak diperlukan. Disamping itu, keterbatasan SDM juga menjadi masalah, mengingat saat ini pejabat fungsional litkayasa/perekayasa maupun teknisi penguji K3 sangat terbatas dibandingkan jumlah perusahaan industri di Jawa Timur.

Diagram 2.23
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja tahun 2009 - 2013

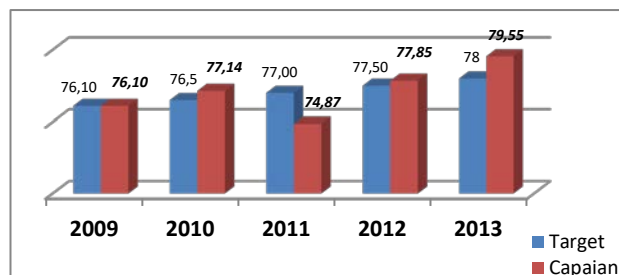


19. Hasil survey IKM pelayanan K3:

Dilakukan terhadap responden yaitu pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan (a) pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja, dan (b) pengujian kualitas udara. Jika diamati, capaian nilai IKM pelayanan K3 pada tahun 2011 sempat menunjukkan penurunan 2,94% atau 2,27 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dan mulai naik kembali cukup berarti di tahun 2012 (naik 2,98 poin atau 3,98%), bahkan mampu melebihi target yang ditetapkan di tahun tersebut. Secara umum capaian IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial selama tahun 2009 - 2013 berada pada

nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan 'baik'). Namun demikian, meski pelayanan K3 relatif sudah memenuhi target, masih tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin dan mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan.

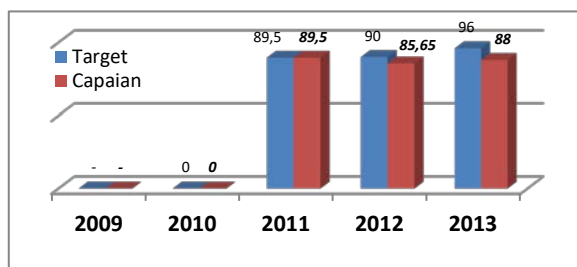
Diagram 2.24
Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan K3 tahun 2009 - 2013



20. % kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP :

Pemutakhiran data e-KTP di Jawa Timur termasuk Nasional baru dilaksanakan pada tahun 2010, sehingga capaian kinerja tahun 2009 dan 2010 untuk perekaman data e-KTP dengan NIK Tunggal belum tersedia (*not available*). Pelaksanaan perekaman data hingga kini belum tuntas sepenuhnya karena adanya berbagai kendala di lapangan, antara lain tidak seimbangny peralatan yang ada dengan kapasitas perekaman data yang harus dilakukan. Untuk itu, bagi kecamatan yang jumlah wajib KTP-nya sangat besar diperlukan peralatan perekaman data tambahan, sekaligus menambah jam pelayanan perekaman data e-KTP dengan NIK Tunggal.

Diagram 2.25
Perkembangan target dan capaian kinerja persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP tahun 2009 - 2013

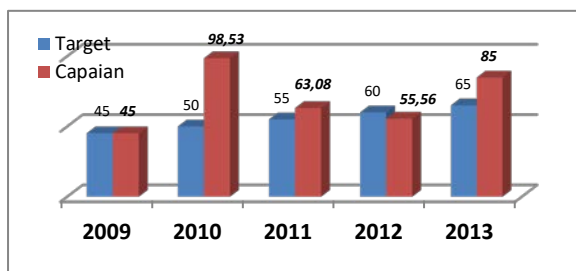


21. % penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga) :

Target penempatan transmigran selama periode 2009 -2013 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Terutama pada tahun 2012, capaian kinerja penempatan transmigran tidak mencapai 100% dari target yang ditetapkan, dikarenakan faktor ketidaksiapan lokasi/daerah penempatan sehingga STP (Surat Terima Penempatan) dari daerah tujuan/lokasi penempatan terlambat dikeluarkan. Hal ini berakibat pada keterlambatan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) yang dikeluarkan oleh Pusat, sehingga pengiriman transmigran asal Jawa Timurlpun menjadi terhambat. Kondisi inilah yang

mengakibatkan target pemberangkatan transmigran menjadi terhambat dan akan dilaksanakan pemberangkatan pada tahun berikutnya.

Diagram 2.26
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (KK) tahun 2009 - 2013



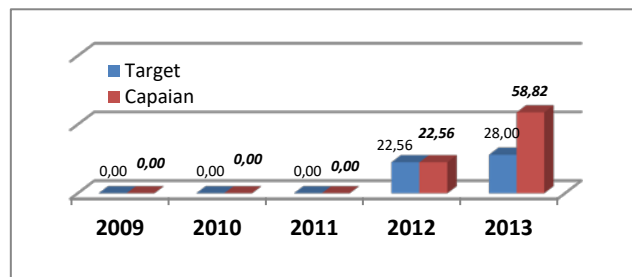
Untuk mengoptimalkan angka penempatan transmigran terutama yang melalui Transmigrasi Umum (TU), mulai tahun 2012 s.d. 2014 dilakukan terobosan berupa program kerjasama *Province to Province* antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab.Bulungan tentang kerjasama penempatan transmigrasi asal Jawa Timur di *Food Estate* Delta Kayan Kab.Bulungan sejumlah 600 KK yang dilaksanakan melalui 3 tahap (tahun 2012 s.d. 2014 dengan target penempatan sebanyak 200 KK/tahun).

22. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya :

Pada tahun 2013 dilakukan survei di 3 Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan dipilih 3 Kabupaten yaitu Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab.Kota Baru.Untuk Provinsi Kalimantan Timur dilakukan survei di Kab.Berau, sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Kab.Ogan Komering Ilir dan Kab. Ogan Ilir. Dari hasil survei diperoleh bahwa transmigran yang telah ditempatkan di 6 (enam) Kabupaten tersebut berjumlah 170 KK. Dari jumlah transmigran tersebut, sebanyak 100 orang berhasil meningkatkan pendapatannya. Jika sebelum bertransmigrasi, penghasilan mereka setiap bulannya berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1 juta, maka setelah bertransmigrasi penghasilannya meningkat menjadi Rp 5 juta, bahkan hingga mencapai kisaran Rp 10 juta setiap bulannya. Dengan demikian, penghasilan mereka meningkat 5 kali sampai 10 kali lipat dari penghasilan/pendapatan sebelum bertransmigrasi.Dari hasil survei, transmigran pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kab. Banjar, Barito Kuala (Simpang Nungki), Kab. Berau dan Kab.Ogan Ilir berpenghasilan Rp. 5 juta s/d 10 juta, sedangkan transmigran di Kab. Barito Kuala (Sawah), Kota Baru dan Kab. Ogan Komering Ilir berpenghasilan di bawah Rp. 5 juta.Sedangkan pada tahun 2012, survei dilakukan di 6 (enam) Kabupaten yang berada di 4 (empat) Provinsi, yaitu Kab. Donggala, Kab. Buol, dan Kab. Tojo Una-Una di Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Gorontalo di Prov. Gorontalo, Kab. Luwu Timur di Prov. Sulawesi Selatan, dan Kab. Konawe di Prov. Sulawesi Tenggara, dengan jumlah transmigran sebanyak 328 orang. Dari jumlah transmigran tersebut, sebanyak 74

orang memiliki pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan di atas Rp. 10.000.000,-. Secara terinci, jumlah transmigran yang pendapatannya berkisar 1 – 5 juta rupiah sebanyak 57 orang, transmigran yang pendapatannya berkisar 5 – 10 juta rupiah sebanyak 14 orang, dan transmigran yang pendapatannya di atas 10 juta rupiah sebanyak 3 orang. Dengan demikian, capaian transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di wilayah yang dilakukan survei pada tahun 2012 sebesar 22,56%.

Diagram 2.27
Perkembangan target dan capaian kinerja
persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya
tahun 2009 - 2013



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur Tahun 2009-2014

NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	56.686.657.000	63.054.225.479	62.506.422.557	62.578.508.000	65.358.100.400	47.099.815.343	56.999.152.268	59.177.743.938	59.564.210.090	62.036.043.352	83,09	90,40	94,67	95,18	94,92	51.579.486.623	56.975.392.998
	Gaji Pegawai dan Tunjangan	56.686.657.000	63.054.225.479	62.506.422.557	62.578.508.000	65.358.100.400	47.099.815.343	56.999.152.268	59.177.743.938	59.564.210.090	62.036.043.352	83,09	90,40	94,67	95,18	94,92	51.579.486.623	56.975.392.998
II.	BELANJA LANGSUNG	64.805.368.200	91.884.506.000	123.540.189.709	140.213.838.283	184.424.838.283	60.449.039.483	86.064.246.427	115.267.697.226	133.491.014.026	176.984.413.555	93,28	93,67	93,30	95,21	95,97	3.317.450	285.811.568
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.644.465.700	2.065.305.000	2.061.347.500	2.507.800.000	2.450.860.000	1.575.050.604	1.954.400.828	2.016.980.885	2.456.974.210	2.403.871.196	95,78	94,63	97,85	97,97	98,08	201.598.575	207.205.148
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		230.000.000	251.280.000	201.000.000	196.800.000		229.700.000	213.729.500	201.000.000	196.800.000	-	99,87	85,06	100,00	100,00	-11.066.670	-10.966.700
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	13.867.264.500	3.027.406.000	13.089.452.500	12.737.200.000	12.877.340.000	12.059.226.518	2.892.124.332	12.296.977.050	12.394.059.767	12.176.852.197	86,96	95,53	93,95	97,31	94,56	-247.481.125	29.406.420
	Program peningkatan disiplin aparatur		165.602.500	468.440.000				164.201.950	460.071.500			-	99,15	98,21	-	-	302.837.500	295.869.550
	Program peningkatan kapasitas SDA		150.600.000	82.980.000				64.630.000	39.680.000			-	42,92	47,82	-	-	-67.620.000	24.950.000
	Program pelayanan administrasi perkantoran		7.985.592.500					7.103.087.227				-	88,95	-	-	-	-	-
	Program perluasan dan penempatan kerja	12.000.000.000	8.600.000.000	6.685.000.000	5.867.000.000	5.700.121.717	10.745.610.400	7.762.456.194	5.785.000.842	5.392.029.526	5.083.742.457	89,55	90,26	86,54	91,90	89,19	-1.574.969.571	-1.415.466.986
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	25.698.388.000	52.660.000.000	78.801.689.709	99.473.838.283	136.586.716.566	24.850.296.629	49.193.186.143	72.913.323.504	95.033.269.482	131.508.305.700	96,70	93,42	92,53	95,54	96,28	27.722.082.142	26.664.502.268
	Program pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja	3.060.000.000	4.500.000.000	6.600.000.000	5.260.000.000	5.062.000.000	3.004.182.205	4.428.400.585	6.438.881.470	5.221.958.908	4.997.823.663	98,18	98,41	97,56	99,28	98,73	500.500.000	498.410.365
	Program pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja	4.555.250.000	3.500.000.000	4.700.000.000	3.921.000.000	6.658.000.000	4.384.747.192	3.440.531.488	4.699.053.130	3.901.439.383	6.598.827.025	96,26	98,30	99,98	99,50	99,11	525.687.500	553.519.958
	Program kependudukan	1.780.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	4.260.000.000	8.229.000.000	1.770.534.215	2.939.437.565	2.925.653.100	4.250.656.900	7.930.040.275	99,47	99,64	99,17	99,78	96,37	1.612.250.000	1.539.876.515
	Program mobilitas penduduk	2.200.000.000	6.050.000.000	7.850.000.000	5.986.000.000	6.664.000.000	2.059.391.720	5.892.090.115	7.478.346.245	4.639.625.850	6.088.151.042	93,61	97,39	95,27	77,51	91,36	1.116.000.000	1.007.189.831
	JUMLAH	121.492.025.200	154.938.731.479	186.046.612.266	202.792.346.283	249.782.938.683	107.548.854.826	143.063.398.695	174.445.441.164	193.055.224.116	239.020.456.907	88,52	92,34	93,76	95,20	95,69	51.582.804.073	57.261.204.566

Dilihat dari capaian anggaran dan realisasi penyerapan anggaran APBD Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013, dapat dikatakan bahwa dari total anggaran pada 3 (tiga) tahun pertama yakni tahun 2009-2011, rata-rata realisasi penyerapannya agak rendah atau berkisar 93%. Namun setelah itu, mulai tahun 2012 realisasi penyerapan total anggaran APBD Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan, menjadi rata-rata di atas 95%.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan program pembangunan yang dilaksanakan di Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, selama 5 (lima) tahun apabila dirata-ratakan, maka realisasi penyerapan terbesar ada pada Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Program Kependudukan serta Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dimana rata-rata realisasi penyerapannya berkisar 97-99%. Sementara itu, realisasi penyerapan terendah ada pada Program Perluasan dan Penempatan Kerja serta Program Mobilitas Penduduk, yaitu rata-rata sebesar 89-93%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab relatif rendahnya penyerapan anggaran pada Program Perluasan dan Penempatan Kerja dan Program Mobilitas Penduduk antara lain :

- Terkendalanya pengiriman transmigrasi ke lokasi penempatan transmigrasi, disebabkan oleh ketidaksiapan daerah penempatan terkait sarana-prasarana perumahan dan lingkungan transmigrasi di lokasi yang bersangkutan. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua transmigran dapat diberangkatkan ke daerah tujuan pada tahun yang bersangkutan.
- Pemberangkatan/pengerahan transmigran baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun dikarenakan menunggu kesiapan daerah penempatan. Akibatnya, penempatan transmigran tidak dapat tercapai sesuai target.
- Dukungan jumlah personil (sumber daya manusia) yang belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung optimalisasi pelayanan pada kedua program ini, sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak berjalan optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan

2.4.1 Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berkenaan dengan perbandingan capaian sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dengan Renstra K/L, perlu diketahui bahwa pada subbab ini terdapat 2 (dua) Renstra K/L yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014 serta Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014.

Adapun perbandingan/komparasi capaian sasaran tersebut sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dengan Target Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROV. JATIM THN 2013	TARGET NASIONAL THN 2013
(1)	(2)	(4)	(5)
1	% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi	39,81%	105.000 orang
2	% peningkatan calon tenaga kerja yg dimagang-kerjakan di : - Dalam negeri - Luar negeri	8,57% 60,67%	10.000 orang 300 orang
3	% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja	26,83%	19.000 orang
4	Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	79,98	
5	% penempatan pencari kerja	58,41%	101.500 orang
6	Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : - % perusahaan anggota aktif PLKT - % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja	75,07% 20,34%	33 Provinsi
7	Hasil survey IKM : - Pelayanan penempatan tenaga kerja - Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	74,81 71,27	
8	% tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis)	95,51%	10.125 orang
9	% penurunan kasus perselisihan hub. Industrial	-5,71%	85%
10	% peningkatan upah pekerja	22,14%	
11	% peningkatan Peraturan Perusahaan (PP)	39,95%	2.000 PP
12	% peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	24,96%	250 PKB
13	Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hub. Industrial	77,09	
14	% penurunan kasus kecelakaan kerja	9,75%	
15	% peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) : - Kecelakaan nihil (zero accident) - SMK3 (Sistem Manajemen K3)	25,82% 18,75%	
16	% kepesertaan jamsostek aktif : - Orang (tenaga kerja) - Perusahaan	36,27% 66,34%	400.000 orang
17	% pengujian kualitas udara emisi & ambien	98,32%	
18	% pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja	100,00%	
19	Hasil survey IKM pelayanan K3	79,55	
20	% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP	88,05%	
21	% penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga)	84,79%	9.250 KK
22	% transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi & sosialnya	58,82%	

Apabila diamati, terdapat perbedaan penetapan indikator capaian sasaran pada Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dengan kedua Renstra K/L tersebut. Yang pertama, indikator sasaran pada Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur tidak seluruhnya sama dan mengadopsi dari Renstra K/L. Yang kedua, indikator capaian sasaran pada Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur sudah bersifat *outcome*, sehingga sulit untuk dilakukan komparasi dengan indikator capaian sasaran pada Renstra K/L yang sebagian besar masih bersifat *output*.

2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan

Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal atau disebut dengan SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun daerah Kab./Kota. Dengan demikian, SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab./Kota.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM.

Selanjutnya, melalui (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, dan yang terbaru adalah (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 4/MEN/II/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah menyusun SPM Bidang Ketenagakerjaan. SPM Bidang Ketenagakerjaan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Berpedoman pada ketentuan yang mendasarinya, SPM Bidang Ketenagakerjaan meliputi 5 (lima) pelayanan dasar. Kelima pelayanan dasar tersebut wajib dilaksanakan pencapaiannya oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, baik di tingkat Provinsi maupun Kab./Kota, dengan mengacu pada target pencapaian yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016.

Sesuai ketentuan yang ada, maka SPM Ketenagakerjaan saat ini ditetapkan sebagai salah satu indikator bidang ketenagakerjaan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 – 2019, serta menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019. Penetapan SPM Ketenagakerjaan sebagai indikator di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun IKU Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 – 2019 merupakan hal yang baru, mengingat pada periode sebelumnya SPM Ketenagakerjaan belum masuk ke dalam dokumen RPJMD maupun Renstra Dinas periode tahun 2009 – 2014, mengingat SPM Ketenagakerjaan baru berlaku secara efektif pada tahun 2012.

Tabel 2.11
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan

NO	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR	NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016
		3. Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yg terdaftar yg ditempatkan	40%	2016
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial	Besaran kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yg menjadi peserta program Jamsostek aktif	50%	2016
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016
		2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016

2.4.3 Pelayanan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan Responsif Gender

Pada periode 2014 – 2019, terdapat tantangan maupun peluang pengembangan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan di Jawa Timur yang berorientasi kepada pelayanan yang responsif gender. Dalam kaca mata pengarusutamaan gender, perempuan dan laki-laki berkesempatan untuk terlibat dan dilibatkan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Implementasi pengarusutamaan gender atau PUG perlu didukung dengan Anggaran yang Responsif Gender (ARG), sehingga diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau PPRG merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan anggaran maupun kegiatannya.

Dalam konteks penerapan PPRG, data terpilah menurut jenis kelamin dan *gender statistic* sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, data terpilah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan berikut ini menjadi acuan yang sangat berharga untuk menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang responsif gender pada periode 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 2.12
Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

NO	JENIS KELAMIN	PENDUDUK					
		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Laki-laki	18,599,308	49.23	18,740,054	49.25	18,925,100	49.33
2	Perempuan	19,182,291	50.77	19,312,896	50.75	19,438,100	50.67
JUMLAH JATIM		37,781,599	100.00	38,052,950	100.00	38,363,200	100.00

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur, data proyeksi

Dilihat dari komposisi penduduk Jawa Timur berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk perempuan cenderung lebih banyak (berkisar 50 – 51%) dibandingkan penduduk laki-laki (berkisar 49%). Dalam konteks ketenagakerjaan, komposisi ini akan mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, hingga angka pengangguran di Jawa Timur.

Tabel 2.13
Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

NO	URAIAN / INDIKATOR KETENAGAKERJAAN	AGUSTUS 2011			AGUSTUS 2012			AGUSTUS 2013		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Penduduk Usia Kerja	13.863.380	14.576.773	28.440.153	13.935.254	14.651.674	28.586.928	14.039.845	14.762.038	28.801.883
2	Angkatan Kerja :	11.742.922	8.018.964	19.761.886	11.813.388	8.088.170	19.901.558	11.936.414	8.201.381	20.137.795
	- Penduduk yang bekerja	11.346.938	7.593.402	18.940.340	11.346.804	7.735.191	19.081.995	11.402.210	7.864.247	19.266.457
	- Penganggur	395.984	425.562	821.546	466.584	352.979	819.563	534.204	337.134	871.338
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,37%	5,31%	4,16%	3,95%	4,36%	4,12%	4,48%	4,11%	4,33%
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,70%	55,01%	69,49%	84,77%	55,20%	69,62%	85,02%	55,56%	69,92%

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat penduduk usia kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas. Dilihat dari keadaan 3 (tiga) tahun terakhir, penduduk usia kerja perempuan selalu lebih tinggi jumlahnya dibandingkan laki-laki. Namun apabila penduduk usia kerja tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam angkatan kerja (meliputi penduduk yang bekerja dan penganggur), nampak bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan angkatan kerja perempuan. Hal ini wajar, mengingat secara kodrati kaum laki-laki merupakan kepala keluarga dan pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun apabila diamati lebih seksama, dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat kenaikan jumlah

penduduk yang bekerja perempuan secara cukup signifikan, dan di saat bersamaan jumlah penganggur perempuan secara bertahap mengalami penurunan signifikan. Juga nampak bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur semakin banyak kaum perempuan masuk ke dalam kelompok angkatan kerja dan memasuki pasar kerja formal maupun kesempatan kerja di sektor informal. Terlebih, data yang ada menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di Jawa Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan *trend* menurun secara signifikan, berbanding terbalik dengan TPT laki-laki yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, dimana saat ini kaum perempuan semakin mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berusaha dan mendapatkan peluang kerja, dan yang terpenting adalah adanya pengakuan terhadap kualifikasi perempuan yang memasuki pasar kerja.

Secara lebih terinci, perkembangan proporsi penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, maupun penganggur laki-laki dan perempuan di Jawa Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir nampak melalui tabel-tabel berikut :

Tabel 2.14
Angkatan Kerja (Laki-Laki) Menurut Kab./Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	172,347	1.47	180,550	1.53	182,611	1.53
2	Kab. Ponorogo	283,517	2.41	278,595	2.36	272,654	2.28
3	Kab. Trenggalek	219,107	1.87	228,425	1.93	229,062	1.92
4	Kab. Tulungagung	303,397	2.58	309,400	2.62	306,807	2.57
5	Kab. Blitar	358,185	3.05	375,606	3.18	385,365	3.23
6	Kab. Kediri	475,588	4.05	470,881	3.99	476,323	3.99
7	Kab. Malang	783,590	6.67	804,167	6.81	786,795	6.59
8	Kab. Lumajang	312,742	2.66	325,436	2.75	306,466	2.57
9	Kab. Jember	717,281	6.11	723,571	6.13	716,542	6.00
10	Kab. Banyuwangi	492,451	4.19	505,333	4.28	519,268	4.35
11	Kab. Bondowoso	233,550	1.99	239,311	2.03	233,420	1.96
12	Kab. Situbondo	208,098	1.77	210,086	1.78	208,479	1.75
13	Kab. Probolinggo	333,640	2.84	350,553	2.97	369,088	3.09
14	Kab. Pasuruan	474,243	4.04	483,630	4.09	493,353	4.13
15	Kab. Sidoarjo	613,443	5.22	602,290	5.10	616,164	5.16
16	Kab. Mojokerto	325,724	2.77	327,847	2.78	332,792	2.79
17	Kab. Jombang	369,711	3.15	377,372	3.19	370,283	3.10
18	Kab. Nganjuk	325,471	2.77	329,207	2.79	325,722	2.73
19	Kab. Madiun	213,201	1.82	215,888	1.83	219,836	1.84
20	Kab. Magetan	196,767	1.68	190,009	1.61	194,538	1.63
21	Kab. Ngawi	264,033	2.25	247,024	2.09	269,305	2.26
22	Kab. Bojonegoro	394,749	3.36	393,552	3.33	412,799	3.46
23	Kab. Tuban	361,907	3.08	362,183	3.07	363,383	3.04
24	Kab. Lamongan	373,551	3.18	358,637	3.04	359,718	3.01
25	Kab. Gresik	363,766	3.10	354,956	3.00	371,889	3.12
26	Kab. Bangkalan	249,885	2.13	255,145	2.16	259,733	2.18
27	Kab. Sampang	246,115	2.10	256,300	2.17	263,697	2.21
28	Kab. Pamekasan	236,615	2.01	238,605	2.02	242,435	2.03
29	Kab. Sumenep	330,810	2.82	321,372	2.72	313,404	2.63
30	Kota Kediri	83,281	0.71	80,724	0.68	79,034	0.66
31	Kota Blitar	40,032	0.34	38,239	0.32	39,940	0.33
32	Kota Malang	251,329	2.14	241,083	2.04	249,356	2.09
33	Kota Probolinggo	58,794	0.50	64,896	0.55	62,932	0.53
34	Kota Pasuruan	55,485	0.47	55,934	0.47	56,769	0.48
35	Kota Mojokerto	36,976	0.31	37,680	0.32	37,518	0.31
36	Kota Madiun	52,735	0.45	49,424	0.42	51,917	0.43
37	Kota Surabaya	871,308	7.42	866,752	7.34	892,439	7.48
38	Kota Batu	59,498	0.51	62,725	0.53	64,578	0.54
JML ANGKATAN KERJA LAKI-LAKI		11,742,922	100.00	11,813,388	100.00	11,936,414	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Tabel 2.15
Angkatan Kerja (Perempuan) Menurut Kab./Kotadi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	119,878	1.49	157,875	1.95	154,529	1.88
2	Kab. Ponorogo	188,550	2.35	216,119	2.67	209,031	2.55
3	Kab. Trenggalek	145,268	1.81	178,759	2.21	178,562	2.18
4	Kab. Tulungagung	214,281	2.67	236,067	2.92	234,331	2.86
5	Kab. Blitar	232,653	2.90	252,514	3.12	230,894	2.82
6	Kab. Kediri	315,608	3.94	320,808	3.97	302,640	3.69
7	Kab. Malang	511,704	6.38	500,960	6.19	505,444	6.16
8	Kab. Lumajang	218,588	2.73	195,064	2.41	202,025	2.46
9	Kab. Jember	491,379	6.13	404,933	5.01	433,854	5.29
10	Kab. Banyuwangi	325,335	4.06	365,615	4.52	346,479	4.22
11	Kab. Bondowoso	159,792	1.99	163,634	2.02	154,357	1.88
12	Kab. Situbondo	145,723	1.82	142,445	1.76	141,297	1.72
13	Kab. Probolinggo	235,952	2.94	272,984	3.38	239,190	2.92
14	Kab. Pasuruan	323,315	4.03	320,650	3.96	326,981	3.99
15	Kab. Sidoarjo	405,592	5.06	372,620	4.61	411,498	5.02
16	Kab. Mojokerto	217,364	2.71	218,308	2.70	205,664	2.51
17	Kab. Jombang	250,547	3.12	224,542	2.78	214,604	2.62
18	Kab. Nganjuk	218,388	2.72	194,495	2.40	215,141	2.62
19	Kab. Madiun	146,425	1.83	144,871	1.79	140,249	1.71
20	Kab. Magetan	136,826	1.71	162,460	2.01	152,480	1.86
21	Kab. Ngawi	184,840	2.31	170,536	2.11	195,980	2.39
22	Kab. Bojonegoro	268,531	3.35	257,026	3.18	272,767	3.33
23	Kab. Tuban	243,719	3.04	212,379	2.63	244,926	2.99
24	Kab. Lamongan	262,631	3.28	260,194	3.22	274,284	3.34
25	Kab. Gresik	248,307	3.10	202,667	2.51	240,432	2.93
26	Kab. Bangkalan	183,701	2.29	199,998	2.47	206,438	2.52
27	Kab. Sampang	174,389	2.17	220,584	2.73	196,725	2.40
28	Kab. Pamekasan	162,908	2.03	220,124	2.72	230,216	2.81
29	Kab. Sumenep	240,561	3.00	306,016	3.78	306,850	3.74
30	Kota Kediri	56,516	0.70	57,866	0.72	56,545	0.69
31	Kota Blitar	27,389	0.34	26,692	0.33	27,740	0.34
32	Kota Malang	175,848	2.19	172,850	2.14	182,047	2.22
33	Kota Probolinggo	40,949	0.51	44,385	0.55	41,954	0.51
34	Kota Pasuruan	38,397	0.48	37,662	0.47	40,053	0.49
35	Kota Mojokerto	26,087	0.33	27,213	0.34	27,586	0.34
36	Kota Madiun	37,601	0.47	34,322	0.42	37,397	0.46
37	Kota Surabaya	603,839	7.53	552,925	6.84	581,026	7.08
38	Kota Batu	39,583	0.49	39,008	0.48	39,165	0.48
JML ANGKATAN KERJA PEREMPUAN		8,018,964	100.00	8,088,170	100.00	8,201,381	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Tabel 2.16
Penduduk yang Bekerja (Laki-Laki) Menurut Kab./Kotadi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	168,767	1.49	178,286	1.57	181,251	1.59
2	Kab. Ponorogo	273,549	2.41	271,896	2.40	261,909	2.30
3	Kab. Trenggalek	213,253	1.88	218,844	1.93	215,697	1.89
4	Kab. Tulungagung	295,139	2.60	299,324	2.64	298,481	2.62
5	Kab. Blitar	346,641	3.05	363,747	3.21	372,183	3.26
6	Kab. Kediri	460,413	4.06	450,031	3.97	458,734	4.02
7	Kab. Malang	755,119	6.65	773,744	6.82	741,164	6.50
8	Kab. Lumajang	306,279	2.70	312,443	2.75	301,925	2.65
9	Kab. Jember	694,237	6.12	697,638	6.15	690,089	6.05
10	Kab. Banyuwangi	475,083	4.19	487,185	4.29	492,768	4.32
11	Kab. Bondowoso	227,089	2.00	233,370	2.06	227,447	1.99
12	Kab. Situbondo	200,263	1.76	203,825	1.80	200,925	1.76
13	Kab. Probolinggo	327,906	2.89	345,662	3.05	353,721	3.10
14	Kab. Pasuruan	456,315	4.02	453,552	4.00	469,937	4.12
15	Kab. Sidoarjo	587,016	5.17	576,624	5.08	590,653	5.18
16	Kab. Mojokerto	315,097	2.78	320,165	2.82	321,923	2.82
17	Kab. Jombang	357,746	3.15	350,831	3.09	351,554	3.08
18	Kab. Nganjuk	313,501	2.76	317,921	2.80	313,643	2.75
19	Kab. Madiun	208,179	1.83	208,097	1.83	207,615	1.82
20	Kab. Magetan	191,659	1.69	185,027	1.63	188,465	1.65
21	Kab. Ngawi	255,946	2.26	240,283	2.12	255,049	2.24
22	Kab. Bojonegoro	383,336	3.38	380,843	3.36	389,504	3.42
23	Kab. Tuban	349,727	3.08	352,561	3.11	351,875	3.09
24	Kab. Lamongan	358,879	3.16	341,558	3.01	344,015	3.02
25	Kab. Gresik	350,982	3.09	334,953	2.95	352,193	3.09
26	Kab. Bangkalan	240,558	2.12	240,142	2.12	241,418	2.12
27	Kab. Sampang	239,437	2.11	249,764	2.20	248,010	2.18
28	Kab. Pamekasan	229,824	2.03	233,036	2.05	236,870	2.08
29	Kab. Sumenep	319,450	2.82	317,169	2.80	303,416	2.66
30	Kota Kediri	79,889	0.70	73,937	0.65	71,480	0.63
31	Kota Blitar	38,540	0.34	37,467	0.33	36,725	0.32
32	Kota Malang	240,394	2.12	221,781	1.95	232,107	2.04
33	Kota Probolinggo	56,412	0.50	60,947	0.54	59,363	0.52
34	Kota Pasuruan	53,039	0.47	53,466	0.47	52,831	0.46
35	Kota Mojokerto	35,142	0.31	36,212	0.32	35,207	0.31
36	Kota Madiun	50,219	0.44	46,083	0.41	48,109	0.42
37	Kota Surabaya	834,344	7.35	818,026	7.21	840,203	7.37
38	Kota Batu	57,569	0.51	60,364	0.53	63,751	0.56
JML PENDUDUK YG BEKERJA LAKI-LAKI		11,346,938	100.00	11,346,804	100.00	11,402,210	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Tabel 2.17
Penduduk yang Bekerja (Perempuan) Menurut Kab./Kotadi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	115,577	1.52	156,213	2.02	152,527	1.94
2	Kab. Ponorogo	177,901	2.34	206,677	2.67	203,962	2.59
3	Kab. Trenggalek	139,549	1.84	175,566	2.27	175,137	2.23
4	Kab. Tulungagung	203,986	2.69	228,799	2.96	227,694	2.90
5	Kab. Blitar	222,842	2.93	246,383	3.19	221,030	2.81
6	Kab. Kediri	294,858	3.88	308,712	3.99	283,652	3.61
7	Kab. Malang	480,147	6.32	481,924	6.23	483,943	6.15
8	Kab. Lumajang	210,681	2.77	183,589	2.37	196,114	2.49
9	Kab. Jember	466,704	6.15	386,769	5.00	414,688	5.27
10	Kab. Banyuwangi	312,327	4.11	354,132	4.58	332,340	4.23
11	Kab. Bondowoso	155,097	2.04	154,478	2.00	152,380	1.94
12	Kab. Situbondo	136,802	1.80	137,053	1.77	138,120	1.76
13	Kab. Probolinggo	223,468	2.94	265,519	3.43	234,346	2.98
14	Kab. Pasuruan	302,701	3.99	299,045	3.87	314,707	4.00
15	Kab. Sidoarjo	383,575	5.05	347,470	4.49	394,593	5.02
16	Kab. Mojokerto	204,583	2.69	207,321	2.68	199,670	2.54
17	Kab. Jombang	236,215	3.11	210,792	2.73	200,556	2.55
18	Kab. Nganjuk	204,649	2.70	183,667	2.37	201,510	2.56
19	Kab. Madiun	139,315	1.83	137,656	1.78	135,533	1.72
20	Kab. Magetan	131,380	1.73	153,838	1.99	148,063	1.88
21	Kab. Ngawi	174,685	2.30	164,527	2.13	186,710	2.37
22	Kab. Bojonegoro	252,212	3.32	246,903	3.19	256,155	3.26
23	Kab. Tuban	230,781	3.04	197,583	2.55	230,104	2.93
24	Kab. Lamongan	249,317	3.28	246,467	3.19	258,266	3.28
25	Kab. Gresik	234,427	3.09	185,197	2.39	232,529	2.96
26	Kab. Bangkalan	176,079	2.32	190,784	2.47	192,852	2.45
27	Kab. Sampang	164,609	2.17	218,651	2.83	190,586	2.42
28	Kab. Pamekasan	158,140	2.08	215,141	2.78	225,420	2.87
29	Kab. Sumenep	230,704	3.04	302,726	3.91	301,031	3.83
30	Kota Kediri	53,018	0.70	53,775	0.70	53,255	0.68
31	Kota Blitar	26,052	0.34	25,161	0.33	26,743	0.34
32	Kota Malang	164,598	2.17	160,345	2.07	165,987	2.11
33	Kota Probolinggo	38,680	0.51	42,736	0.55	40,779	0.52
34	Kota Pasuruan	36,220	0.48	36,068	0.47	38,824	0.49
35	Kota Mojokerto	24,223	0.32	23,932	0.31	26,195	0.33
36	Kota Madiun	35,465	0.47	32,041	0.41	35,257	0.45
37	Kota Surabaya	564,849	7.44	529,654	6.85	555,401	7.06
38	Kota Batu	36,986	0.49	37,897	0.49	37,588	0.48
JML PENDUDUK YG BEKERJA PEREMPUAN		7,593,402	100.00	7,735,191	100.00	7,864,247	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Tabel 2.18
Penganggur Terbuka (Laki-Laki) Menurut Kab./Kotadi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	3,580	0.90	2,264	0.49	1,360	0.25
2	Kab. Ponorogo	9,968	2.52	6,699	1.44	10,745	2.01
3	Kab. Trenggalek	5,854	1.48	9,581	2.05	13,365	2.50
4	Kab. Tulungagung	8,258	2.09	10,076	2.16	8,326	1.56
5	Kab. Blitar	11,544	2.92	11,859	2.54	13,182	2.47
6	Kab. Kediri	15,175	3.83	20,850	4.47	17,589	3.29
7	Kab. Malang	28,471	7.19	30,423	6.52	45,631	8.54
8	Kab. Lumajang	6,463	1.63	12,993	2.78	4,541	0.85
9	Kab. Jember	23,044	5.82	25,933	5.56	26,453	4.95
10	Kab. Banyuwangi	17,368	4.39	18,148	3.89	26,500	4.96
11	Kab. Bondowoso	6,461	1.63	5,941	1.27	5,973	1.12
12	Kab. Situbondo	7,835	1.98	6,261	1.34	7,554	1.41
13	Kab. Probolinggo	5,734	1.45	4,891	1.05	15,367	2.88
14	Kab. Pasuruan	17,928	4.53	30,078	6.45	23,416	4.38
15	Kab. Sidoarjo	26,427	6.67	25,666	5.50	25,511	4.78
16	Kab. Mojokerto	10,627	2.68	7,682	1.65	10,869	2.03
17	Kab. Jombang	11,965	3.02	26,541	5.69	18,729	3.51
18	Kab. Nganjuk	11,970	3.02	11,286	2.42	12,079	2.26
19	Kab. Madiun	5,022	1.27	7,791	1.67	12,221	2.29
20	Kab. Magetan	5,108	1.29	4,982	1.07	6,073	1.14
21	Kab. Ngawi	8,087	2.04	6,741	1.44	14,256	2.67
22	Kab. Bojonegoro	11,413	2.88	12,709	2.72	23,295	4.36
23	Kab. Tuban	12,180	3.08	9,622	2.06	11,508	2.15
24	Kab. Lamongan	14,672	3.71	17,079	3.66	15,703	2.94
25	Kab. Gresik	12,784	3.23	20,003	4.29	19,696	3.69
26	Kab. Bangkalan	9,327	2.36	15,003	3.22	18,315	3.43
27	Kab. Sampang	6,678	1.69	6,536	1.40	15,687	2.94
28	Kab. Pamekasan	6,791	1.71	5,569	1.19	5,565	1.04
29	Kab. Sumenep	11,360	2.87	4,203	0.90	9,988	1.87
30	Kota Kediri	3,392	0.86	6,787	1.45	7,554	1.41
31	Kota Blitar	1,492	0.38	772	0.17	3,215	0.60
32	Kota Malang	10,935	2.76	19,302	4.14	17,249	3.23
33	Kota Probolinggo	2,382	0.60	3,949	0.85	3,569	0.67
34	Kota Pasuruan	2,446	0.62	2,468	0.53	3,938	0.74
35	Kota Mojokerto	1,834	0.46	1,468	0.31	2,311	0.43
36	Kota Madiun	2,516	0.64	3,341	0.72	3,808	0.71
37	Kota Surabaya	36,964	9.33	48,726	10.44	52,236	9.78
38	Kota Batu	1,929	0.49	2,361	0.51	827	0.15
JML PENGANGGUR TERBUKA LAKI-LAKI		395,984	100.00	466,584	100.00	534,204	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah

Tabel 2.19
Penganggur Terbuka (Perempuan) Menurut Kab./Kotadi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO	KAB./KOTA	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Kab. Pacitan	4,301	1.01	1,662	0.47	2,002	0.59
2	Kab. Ponorogo	10,649	2.50	9,442	2.67	5,069	1.50
3	Kab. Trenggalek	5,719	1.34	3,193	0.90	3,425	1.02
4	Kab. Tulungagung	10,295	2.42	7,268	2.06	6,637	1.97
5	Kab. Blitar	9,811	2.31	6,131	1.74	9,864	2.93
6	Kab. Kediri	20,750	4.88	12,096	3.43	18,988	5.63
7	Kab. Malang	31,557	7.42	19,036	5.39	21,501	6.38
8	Kab. Lumajang	7,907	1.86	11,475	3.25	5,911	1.75
9	Kab. Jember	24,675	5.80	18,164	5.15	19,166	5.68
10	Kab. Banyuwangi	13,008	3.06	11,483	3.25	14,139	4.19
11	Kab. Bondowoso	4,695	1.10	9,156	2.59	1,977	0.59
12	Kab. Situbondo	8,921	2.10	5,392	1.53	3,177	0.94
13	Kab. Probolinggo	12,484	2.93	7,465	2.11	4,844	1.44
14	Kab. Pasuruan	20,614	4.84	21,605	6.12	12,274	3.64
15	Kab. Sidoarjo	22,017	5.17	25,150	7.13	16,905	5.01
16	Kab. Mojokerto	12,781	3.00	10,987	3.11	5,994	1.78
17	Kab. Jombang	14,332	3.37	13,750	3.90	14,048	4.17
18	Kab. Nganjuk	13,739	3.23	10,828	3.07	13,631	4.04
19	Kab. Madiun	7,110	1.67	7,215	2.04	4,716	1.40
20	Kab. Magetan	5,446	1.28	8,622	2.44	4,417	1.31
21	Kab. Ngawi	10,155	2.39	6,009	1.70	9,270	2.75
22	Kab. Bojonegoro	16,319	3.83	10,123	2.87	16,612	4.93
23	Kab. Tuban	12,938	3.04	14,796	4.19	14,822	4.40
24	Kab. Lamongan	13,314	3.13	13,727	3.89	16,018	4.75
25	Kab. Gresik	13,880	3.26	17,470	4.95	7,903	2.34
26	Kab. Bangkalan	7,622	1.79	9,214	2.61	13,586	4.03
27	Kab. Sampang	9,780	2.30	1,933	0.55	6,139	1.82
28	Kab. Pamekasan	4,768	1.12	4,983	1.41	4,796	1.42
29	Kab. Sumenep	9,857	2.32	3,290	0.93	5,819	1.73
30	Kota Kediri	3,498	0.82	4,091	1.16	3,290	0.98
31	Kota Blitar	1,337	0.31	1,531	0.43	997	0.30
32	Kota Malang	11,250	2.64	12,505	3.54	16,060	4.76
33	Kota Probolinggo	2,269	0.53	1,649	0.47	1,175	0.35
34	Kota Pasuruan	2,177	0.51	1,594	0.45	1,229	0.36
35	Kota Mojokerto	1,864	0.44	3,281	0.93	1,391	0.41
36	Kota Madiun	2,136	0.50	2,281	0.65	2,140	0.63
37	Kota Surabaya	38,990	9.16	23,271	6.59	25,625	7.60
38	Kota Batu	2,597	0.61	1,111	0.31	1,577	0.47
JML PENGANGGUR TERBUKA PEREMPUAN		425,562	100.00	352,979	100.00	337,134	100.00

Sumber : BPS & Kemenakertrans RI, data diolah